

## Aktivisme Partisipasi Sosial Warga Negara Berbasis Digital

Aina Nurdiyanti<sup>1</sup>✉, Hendrayanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Gorontalo

Correspondence Author: [ainanurdiyanti@ung.ac.id](mailto:ainanurdiyanti@ung.ac.id)✉

### Article history

Received : 2023-02-14

Revised : 2023-04-16

Accepted : 2023-06-18

Published : 2023-08-04

### Kata Kunci:

Online Activism,  
Social Participatio,  
Citizens

**Abstract:** After the fourth Industrial Revolution, there have been far more massive changes in the socio-cultural aspects. On the one hand, there is digital behavior that is less productive and even has the potential to be destructive on the internet. On the other hand, there is also the phenomenon of developing virtual tools to support the development of democracy, advancing social civilization, and strengthening the culture of participatory citizens in the digital era which is becoming an urgent matter. The process of building and developing digital access as a vehicle for citizens to actualize public participation in the social and humanitarian sector is an interesting symptom to study scientifically. This research is a theoretical study of the phenomenon of courageous activism through the use of the internet and digital media in Indonesia within the framework of fostering citizen participation in the digital era. Through this research, brave activism through the use of the internet and digital media in Indonesia will be studied theoretically based on the results of the literature. Studies on the internet in relation to social movement activism as mentioned have produced two perspectives. One is that the internet can facilitate activism in a compelling realm. Second, the internet enhances existing practice movements by boldly adding campaigns through various methods. This study is important to be raised as a topic based on several reasons. Theoretically, there are benefits for the field of citizenship education studies, namely the aspects of citizenship education in the socio-cultural realm. Second, practically, that what is found can reveal the best practices of citizenship in the digital era. We can get the driving factors which we can then predict the factors that make this positive culture in the form of digital-based social participation to be maintained.

**Abstrak:** Pasca Revolusi Industri keempat telah terjadi perubahan yang jauh massif pada aspek sosio-kultural. Disatu sisi, terdapat perilaku digital yang kurang produktif bahkan potensi berinternet secara desktruktif. Di sisi lain terdapat pula fenomena pengembangan perangkat maya untuk menyokong pembangunan demokrasi, pemajuan peradaban sosial, dan penguatan budaya warga negara partisipatif di era digital menjadi suatu yang urgen. Proses membangun dan mengembangkan akses digital sebagai wahana bagi warga negara mengaktualisasikan partisipasi publik pada sektor sosial kemanusiaan menjadi gejala yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Penelitian ini adalah kajian teoretis terhadap fenomena aktivisme daring melalui pemanfaatan internet dan media digital di Indonesia dalam rangka pembinaan partisipasi warga negara di era digital. Melalui penelitian ini, akan dikaji aktivisme daring melalui pemanfaatan internet dan media digital di Indonesia secara teoretis berdasarkan hasil kepustakaan. Studi-studi tentang internet dalam kaitannya dengan aktivisme gerakan sosial sebagaimana disebutkan telah menghasilkan dua perspektif. Kesatu bahwa internet dapat memfasilitasi aktivisme pada ranah luring. Kedua, internet meningkatkan praktik gerakan yang ada dengan menambahkan kampanye secara daring melalui berbagai metode. Kajian ini



Available online at  
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

mejadi penting untuk diangkat sebagai topik didasarkan pada beberapa alasan. Kesatu secara teoretis, terdapat kebermanfaatn bagi lapangan ilmu pendidikan kewarganegaran yakni kajian pada aspek citizenship education pada domain sosio-kultural. Kedua secara praksis, bahwa apa yang ditemukan dapat mengungkap best practice berwarganegara di era digital. Bisa kita dapatkan faktor pendorong yang kemudian bisa kita prediksi faktor yang membuat budaya positif berupa partisipasi sosial berbasis digital ini bertahan.

## PENDAHULUAN

Revolusi industri keempat memiliki perbedaan signifikan dengan revolusi industri ketiga dan sebelumnya. Pasca Revolusi Industri keempat telah terjadi perubahan yang jauh lebih massif yang melibatkan kemajuan teknologi, mesin, pelbagai inovasi dan kecerdasan buatan (Schäfer, 2018; Hughes & Southern, 2019). Perubahan massif juga terjadi pada aspek sosio-kultural. Pada aspek sosio-kultural, revolusi industri keempat telah menawarkan peluang yang demikian besar terutama dalam hal pemberdayaan (Menon & Fink, 2019). Selain membuka peluang, era yang dikenal dengan revolusi digital ini juga menyebabkan sejumlah persoalan sosial. Salah satunya ialah *social jumping* (Kalidjernih, 2013). Fenomena ini tidak lain disebabkan oleh ketidaksiapan manusia dalam menerima dan memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh era digital. Kita dapati hari ini di Indonesia, potret kecenderungan perilaku digital yang kurang produktif bahkan destruktif.

Asoisasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia tahun 2018 tentang Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia mengungkap persentase penggunaan internet untuk kepentingan mengisi waktu luang, menonton film, video dan musik, bermain game *online*, masih lebih besar dibandingkan akses layanan publik dan literasi berita online (Kominfo RI., 2018). Dinyatakan bahwa 64,8% pengguna internet di Indonesia umumnya menggunakan internet untuk sarana komunikasi personal, entertainment, kesenangan dan hiburan. Fakta ini mengarah pada apa yang disebut dengan masyarakat tontonan (*heavy viewers*). Belum lagi masalah maraknya banalitas berinternet yang negatif diantaranya ujaran kebencian (*hate speech*), *cyber bullying*, perjudian daring, penipuan daring, prostitusi daring, dan kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran siber lainnya. Studi

ini menguatkan argumentasi bahwa kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) perlu diimbangi oleh media yang memadai dan hal ini masih harus terus dikembangkan untuk mengimbangi derasnya arus budaya berinternet yang destruktif.

Dilain sisi, penulis melihat adanya transformasi gerakan sosial berbasis digital yang diinisiasi oleh beberapa program, komunitas, maupun lembaga amal di Indonesia dengan nilai kemudahan, semua orang bisa berpartisipasi dan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial. Cakupannya tidak hanya pada level lokal tetapi juga merambah global. Fenomena ini tentunya menarik untuk dikaji secara ilmiah karena tidak banyak terjadi di Negara lain. Sebuah studi yang dilakukan oleh Hudson Institut Indiana University School of Philanthropy pada tahun 2018, merilis indeks filantropi 100 negara termasuk Indonesia. Studi yang diberi nama *Global Philanthropy Environment Index* ini mengasesmen negara-negara sampel berdasarkan pengaruh praktik filantropi warga negaranya terhadap kehidupan sosial secara luas. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 6 golongan, Indonesia dikategorikan pada golongan keempat dengan indeks 3.0-3.49 dari skala 1.0-5.0. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi sosial harus senantiasa dirawat dan dikembangkan. Salah satu yang bisa dilakukan yakni dengan cara pemanfaatan internet, teknologi, dan media digital. Upaya-upaya untuk mendorong partisipasi warga negara yang mengarah pada pembentukan spirit pengabdian dan pemberdayaan sosial harus lebih massif dilakukan ditengah derasnya budaya lain yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

Untuk mengkaji fenomena menarik yang terjadi, penulis melakukan beberapa kajian kepustakaan untuk melihat apa yang melatari dan mendorong terjadinya aktivisme daring partisipasi sosial di bidang kemanusiaan

seperti praktik filantropi dan kesukarelaan warga Negara. Kajian ini menjadi penting untuk diangkat sebagai topik didasarkan pada beberapa alasan. *Kesatu* secara teoretis, terdapat kebermanfaatan bagi lapangan ilmu pendidikan kewarganegaraan yakni kajian pada aspek *citizenship education* pada domain sosio-kultural. *Kedua* secara praksis, bahwa apa yang ditemukan dapat mengungkap *best practice* berwarga Negara di era digital. Bisa kita dapatkan faktor pendorong yang kemudian bisa kita prediksi faktor yang membuat budaya positif berupa partisipasi sosial berbasis digital ini bertahan.

## **METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *systematic literatur review* dalam mengkaji fenomena aktivisme daring warga Negara di bidang sosial di era digital di Indonesia. Adapun *systematic literature review* adalah suatu kajian ilmiah yang berfokus pada satu topik tertentu untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan topik tersebut. *Systematic literature review* memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan identifikasi atas suatu teori atau metode, mengembangkan suatu teori atau metode, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara suatu teori dengan relevansi di lapangan / terhadap suatu hasil penelitian (Bettany-Saltikov, 2012). Teknik *literature review* dilakukan melalui: (1) pengumpulan data / informasi; (2) melakukan evaluasi data, teori, informasi atau hasil penelitian; dan (3) menganalisa hasil publikasi seperti buku, artikel penelitian atau yang lain terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan medokumentasi dan merewiew beberapa artikel dengan topik aktivisme daring dan studi gerakan sosial yang dipublish pada jurnal-jurnal internasional terindeks maupun nasional terakreditasi yang diperoleh dari database google scholar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan *systematic literatur review*, diperoleh beberapa teori, postulat, dan konsep yang penulis nyatakan relevan

untuk mengkaji aktivisme partisipasi sosial melalui pemanfaatan media dan teknologi digital, hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

### ***Aktivisme Partisipasi Sosial Secara Daring***

Beberapa ahli telah menghasilkan sejumlah literatur tentang model kewarganegaraan baru yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital sebagai salah satu dampak revolusi industri keempat. Media digital dalam kaitannya dengan budaya kewarganegaraan telah menarik banyak perhatian dari kalangan peneliti dan akademisi. Penjelasan akan penulis awali dari teori-teori yang lebih general tentang media digital sebagai wahana aktivisme. Beberapa peneliti telah membuktikan bahwa terdapat asosiasi positif antara teknologi komunikasi dan partisipasi warga negara (Ying, et al., 2010; Brodock, et al., 2009; Zuckerman, 2014). Di era digital telah terjadi perubahan dari “warga negara yang berbakti” secara pasif menjadi “warga negara yang mengaktualisasikan diri” secara aktif dan berdampak. Jika warga negara yang patuh secara pasif ditandai dengan oleh penyaluran suara-suara resmi, terlibat dalam media massa dan partai politik, maka warga yang mengaktualisasikan diri setingkat lebih tinggi yaitu yang secara aktif mencari dan mengevaluasi informasi terpadu tentang nilai-nilai dan aksi yang mereka lakukan (Baek, 2018).

Penelitian survey yang dilakukan pada tahun 2009 oleh DigiActive juga mempostulasikan bahwa situs jejaring sosial adalah pintu masuk yang paling umum untuk aktivisme daring (Brodock, et al., 2009). Aktivisme daring juga terjadi dalam rangka memobilisasi gerakan keadilan. Ternyata pemanfaatan internet telah mampu menciptakan aktivisme luring dan menyuguhkan kerangka tematik baru untuk menganalisa gerakan-gerakan daring dimasa yang akan datang (Summer, 2011). Menurut Castells (2008), media digital diyakini memfasilitasi kekuatan otonom dari gerakan sosial yang beroperasi secara independen terpisah dari lembaga-lembaga politik dan dari media massa (Baek, 2018). Aktivisme daring melalui internet dan media digital juga banyak dikaitkan dengan budaya partisipatif kaum muda. Diantaranya sebagai berikut.

*Kesatu* teknologi digital dan platform media sosial telah memiliki pengaruh besar pada budaya partisipatif kaum muda dalam rangka kohesi sosial (Marlow, 2016). *Kedua* bahwa komunitas telah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai penyeimbang, penguat, dan suplemen gerakan sosial baru dalam bidang lingkungan, pendidikan, dan sosial (Dewantara dan Derajad, 2015). *Ketiga*, media digital tidak lagi dianggap hanya sebagai elemen tambahan atau hiburan, tetapi komunikasi inti dan alat keterlibatan yang digunakan oleh kaum muda di Eropa. Menurut Erstad (2012) dan Livingstone & Sefton-Green (2016), media digital khususnya media sosial kini seringkali dikutip sebagai alat pemberdayaan bagi kaum muda (Pawluczuk, 2018). Banyak organisasi kepemudaan telah berhasil menerapkan teknologi digital dalam program-program mereka.

Studi tentang media digital dan budaya partisipatif warga negara juga dilakukan oleh Zuckerman pada tahun 2014. Ia mencoba menginvestigasi apakah media menghasilkan paradigma baru kewarganegaraan yang partisipatif. Menurutnya kewarganegaraan saat ini sedang mengalami proses perubahan, sesuatu yang sangat terkait dengan kebangkitan media partisipatif yang bergantung pada teori perubahan. Zuckerman berfokus pada aktivis dari konteks non-Barat, misalnya, gerakan Arab Spring. Dalam analisis Zuckerman, perubahan utama dalam mode kewarganegaraan ini mengacu pada teori perubahan yang memandu tindakan. Teori perubahan mengacu pada proses di mana orang percaya bahwa perubahan sosial dapat dicapai. Rute untuk mencapai perubahan sosial yang biasanya diasumsikan dalam model kewarganegaraan tradisional adalah melalui pemerintah, misalnya, dengan memilih. Namun Zuckerman memosisikan aktivisme daring sebagai penggerak kekuatan melalui bidang yang berbeda misalnya dengan menciptakan infrastruktur, mendukung atau menentang suatu berdasarkan alasan politik atau idealisme seseorang untuk mengubah keadaan sosial.

Hari ini di era digital tercatat beberapa fenomena di negara demokrasi mapan dengan indeks kesukarelaan yang tinggi,

voluntarisme dikampanyekan secara daring. Dua studi berupaya mengkaji fenomena tersebut. Cox & Simmons (2018) menteorikan bahwa pemanfaatan digital memungkinkan individu untuk melakukan aksi sukarela secara daring. Sejalan dengan itu, Gray & Hopskins yang meneliti lembaga nirlaba di Selandia Baru menyatakan bahwa hari ini platform media digital menjadi alat pikat. Pasalnya, media digital telah membuka jalan meningkatnya kesukarelaan warga negara kapanpun dan dimanapun (Gray & Hopskin, 2018).

Teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting bagi partisipasi dan pengembangan masyarakat. Kewarganegaraan digital adalah satu wacana yang berkaitan erat dengan itu. Konseptualisasi yang paling populer dalam literatur memaknai kewarganegaraan digital sebagai perilaku normatif warga negara dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi. Kewarganegaraan digital adalah panduan perilaku manusia secara normatif untuk komunitas digital atau masyarakat yang baik (Gray & Hopskin, 2018). Dalam pengertian ini maka, kewarganegaraan digital dianggap sebagai kondisi dimana warga negara mampu berdigital untuk membina diri, mencapai kepentingan bersama secara luas di masyarakat. dan menyokong demokrasi yang sehat.

Kewarganegaraan digital mencakup pemahaman bagaimana warga digital berpartisipasi secara tepat dalam segala hal termasuk perilakunya dalam sistem jejaring sosial (Ribble, M. (2015). Warga negara harus memahami cara menavigasi internet dengan aman dan berkomunikasi secara efektif menggunakan alat digital untuk kebermanfaatannya yang lebih luas. Mosberger dkk (2008) menyebut indikator kewarganegaraan digital ialah ketika warga digital menggunakan teknologi untuk informasi politik, untuk memenuhi tugas kewarganegaraannya, dan menggunakan teknologi di tempat kerja untuk produktivitas (Young, 2014). Kewarganegaraan digital juga dapat dipandang sebagai kemampuan untuk berpartisipasi dalam komunitas daring, serta berkait erat dengan kewarganegaraan atau komunitas lokal dan global (Ghosn-Chelala, Maria. (2018). Beberapa ahli melihat bangkitnya *cyberspace* telah mengubah

perilaku warga dalam proses berdemokrasi maupun dalam pemenuhan partisipasi kemasyarakatan yang lebih layak (*the prerequisites for equitable participation*) (Warf, 2009; Yang et al., 2018).

Konsep kewarganegaraan digital telah menjadi semakin penting bagi pemahaman kita tentang hubungan antara media dan aksi politik, aksi sosial, dan kemungkinan demokratisasi yang ditawarkan oleh internet (Ribble & Miller, 2013). Di era digitalisasi, kewarganegaraan dan konsep-konsep lain sedang dalam proses transformasi berbasis teknologi. Kondisi ini menghasilkan implikasi penting bagi masa depan global serta budaya demokrasi. Perkembangan digital hendaknya mampu menguatkan karakter warga negara dan masyarakat agar menjadi lebih bijaksana dan mampu mengembangkan keterlibatannya. Era ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam hal berwarganegara. Realita saat ini menunjukkan bahwa partisipasi publik pada sektor sosial dan kemanusiaan dalam bentuk kesukarelaan warga negara masih perlu untuk dibangun.

## **Faktor Pendukung Partisipasi sosial Berbasis Digital**

### **1. Voluntarisme Warga Negara**

Bicara tentang partisipasi sosial maka akan sangat berkait erat dengan kerelawanan (*volunteerism*) dan peduli sosial warga negara sebagai basisnya. Voluntarisme adalah bentuk spesifik dari sikap dan tindakan menolong yang melibatkan komitmen jangka panjang (Kemp, 2002; Batson, 1991; Wilson, 2000). Menurut Plato dan Aristoteles, secara etimologis dan filosofis, voluntarisme mengacu pada aktivitas sungguh-sungguh yang didorong oleh kehendak menurut keutamaan tertentu (Munir, 1997). Pada ranah individual, tindakan ini teraktualisasi dalam bentuk altruisme seperti filantropi dan kerelawanan. Pada ranah kolektif, voluntarisme merupakan bentuk khusus dari gerakan sosial. Pada dasarnya yang menjadi semangat dari gerakan ini adalah perjuangan demi perubahan secara luas di masyarakat (Lclau & Mauffe, 2001)

Hustinx dan Lammertyn mengidentifikasi enam unsur voluntarisme yakni: (1) *biographical frame of reference*, yakni sebuah interaksi antara kondisi biografis

individu (motivasi, waktu, dan kesempatan) dengan pengalaman mengenai kegiatan sukarela; (2) *motivational structure*, yakni upaya melakukan kegiatan voluntarisme kolektif atas dasar orientasi komunal (gotong-royong); (3) *the course and intensity of commitment*, yakni kerangka kolektif berdasarkan kuatnya identitas kelompok untuk memastikan kehidupan yang terus-menerus dan dapat diprediksi; (4) *organizational environment*, yaitu pembangunan organisasi sukarela yang formal yang disusun berdasarkan sistem yang tersegmentasi dari kelas sosial yang berbeda baik agama maupun ideologi berdasarkan kepentingan bersama; (5) *the choice of (field of) activity*, yakni penetapan pilihan berdimensi politik untuk beraktivitas dan beraksi dalam kegiatan sukarela, ditentukan oleh afinitas berdasarkan ideologi, keyakinan agama, dan identitas yang kolektif oleh suatu kelompok; (6) *the relation to paid work(er)*, voluntarisme kolektif mempunyai hubungan erat dengan kehidupan yang berasosiasi dengan keterlibatan untuk melakukan niat baik (Permana & Prawira, 2016)

Voluntarisme warga negara memang telah banyak menjadi fokus penelitian dikalangan peneliti dan akademisi. Sebagian besar menyorotinya sebagai suatu perilaku normatif warga negara untuk tujuan-tujuan sosial. Beberapa yang penulis anggap relevan ialah: Jakimow (2018) yang menyorotinya sebagai bentuk *ethic of care and sincerity* yang menguatkan hubungan warga negara dengan negara melalui program pemberdayaan sosial yang didesain pemerintah (Jakimow, 2018), Van Sylke, dkk. (2007) dan Kou, dkk. (2013) yang mencari keterkaitannya dengan identitas seperti ras, gender, etnis, atau agama; Gabriel & Goetschel (2016) mengkaji salah satu bentuk voluntarisme individu yaitu filantropi. Menurutnya tiga motivasi keterlibatan donatur adalah: adanya hubungan kepercayaan pribadi yang kuat antara filantropis dan pelaksana/ pengelola, orientasi nilai, dan keyakinan mereka bahwa apa yang mereka lakukan memberikan kontribusi positif untuk masa depan.

Pandangan lain terkait voluntarisme dikemukakan oleh Olate (2007). Ia menekankan pentingnya voluntarisme warga negara sebagai prasyarat demokrasi yang

mapan. Menurutnya kesukarelaan merupakan sebuah kunci dalam mewujudkan masyarakat madani. Voluntarisme menempati posisi yang krusial dalam rangka pembangunan sosial sehingga sikap tersebut sangat perlu untuk dikembangkan (Hussin & Arshad, 2012). Maka dapat dinyatakan bahwa kesukarelaan warga negara menjadi modal sosial dan unsur yang menentukan kualitas demokrasi sebuah negara. Karena secara filosofis, demokrasi bukan hanya menyoal hubungan warga negara dengan negara, tetapi secara serta merta melekatkan tanggung jawab pada warga negara untuk melembagakan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi kewajiban membangun masyarakat.

## **2. Ketersediaan Program dan Organisasi Sebagai Inisiator Gerakan**

Di Indonesia, fenomena pengembangan partisipasi sosial diinisiasi oleh program-program pemerintah maupun beberapa lembaga amal, korporat, dan beberapa komunitas sosial. Beberapa penelitian telah mengungkap dampak filantropi digital dalam meningkatkan partisipasi sosial (Nurdiyanti & Suryadi, 2019). Gerakan sosial yang digagas telah membuka rute partisipasi berupa filantropi dan kerelawan lokal-global. Hal ini tentunya menunjukkan adanya optimalisasi internet dan media daring dalam rangka mendorong kewarganegaraan digital yang lebih partisipatif yang diinisiasi oleh berbagai program dan ketersediaan komunitas termasuk dengan adanya pemanfaatan digital. Sejalan dengan itu The Integrative Theory of Civic Engagement menyatakan bahwa *availability of community programs & organizations (e.g. corporate volunteer programs)* adalah faktor pendukung keterlibatan warga Negara pada level sistem (Pancer, 2015). Adapun secara teoretis gerakan-gerakan sosial dapat didorong oleh beberapa hal. Berikut beberapa teori yang penulis uraikan untuk menjelaskan lebih dalam terkait gerakan sosial.

Dalam studi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) terdapat dua teori dominan yang saling bertentangan, yaitu the *Resource Mobilization Theory* (Teori Mobilisasi Sumberdaya) dan the *Identity-Oriented Theory* (Teori Orientasi Identitas).

Teori Mobilisasi Sumberdaya pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall. Teori ini merupakan kerangka teoretik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif. Cohen, Zurcher dan Snow (dalam Klandermans, 2002) menyatakan bahwa teori Mobilisasi Sumberdaya merupakan reaksi atas pandangan tradisional dari teori-teori psikologi sosial tentang gerakan sosial. Para teoritis psikologi sosial umumnya mengkaji partisipasi orang-orang dalam suatu gerakan sosial atas dasar sifat-sifat kepribadian (*personality traits*), marginalisasi dan keterasingan (*marginality and alienation*), serta ketidakpuasan dan ideologi (*grievances and ideology*) (dalam Klandermans, 2002).

Teori Mobilisasi Sumberdaya lahir dan berkembang di Amerika memandang bahwa dinamika terjadinya gerakan sosial cenderung melibatkan dimensi-dimensi rasionalitas (bersifat rasional). Teori ini berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial (*social movement*). Fireman dan Gamson memandang bahwa esensi dari *Resource Mobilization Theory* adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial (dalam Pichardo, 1988). Beberapa teoritis telah melakukan kajian untuk memahami basis rasionalitas partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Misalnya Olson mengembangkan model utilitarian untuk menjelaskan partisipasi perilaku kolektif dan menyatakan bahwa untuk dapat memahami mengapa individu terlibat dalam suatu perilaku kolektif maka harus dianalisis tentang konsep imbalan dan biaya (*reward and cost*) yang dialami oleh individu tersebut. Berbagai bentuk biaya (*cost*) yang dihubungkan dengan partisipasi dalam aktivitas kolektif meliputi antara lain: waktu (*time*), uang (*money*), keamanan personal (*personal safety*), dan hilangnya pekerjaan (*loss of job*). Olson berpendapat bahwa aktivitas kolektif harus mampu menawarkan pilihan insentif, seperti prestise (*prestige*), gaji (*salary*), dan

kepemimpinan (*leadership*) untuk menarik partisipasi masyarakat dalam suatu aktivitas kolektif (dalam Pichardo (1988).

Istilah mobilisasi (*mobilization*) yang digunakan oleh Oberschall mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif (dalam Locher, 2002). Adapun faktor penting mengapa kelompok lebih mudah untuk melakukan mobilisasi karena kelompok memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan (*established*), terdapatnya anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan adanya partisipasi tradisional dari para anggotanya. Selain itu, dalam kelompok juga terdapat pemimpin, anggota, tempat pertemuan, kegiatan rutin, rantai sosial, dan berbagi kepercayaan, simbol serta bahasa yang sama. Mengacu kepada perspektif teori mobilisasi sumberdaya yang menyatakan bahwa dinamika terjadinya gerakan sosial cenderung melibatkan dimensi-dimensi rasionalitas (bersifat rasional), maka dapat dirumuskan faktor-faktor determinan terjadinya gerakan sosial adalah meliputi: (1) Organisasi gerakan sosial; (2) Pemimpin dan kepemimpinan; (3) Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya; (4) Jaringan dan partisipasi; dan (5) Peluang dan kapasitas masyarakat. Secara kontras, Teori Identitas lahir dan berkembang di Eropa yang memandang bahwa dinamika terjadinya gerakan sosial cenderung melibatkan dimensi-dimensi emosionalitas (bersifat emotif). Snow dkk (2004) mengkritik Teori Mobilisasi Sumberdaya. Menurut para pendukung teori ini bahwa basis rasionalitas dari teori mobilisasi sumberdaya dianggap tidak cukup memadai dalam menjelaskan gerakan sosial baru. Teori mobilisasi sumberdaya dianggap gagal dalam menjelaskan beberapa ekspresi dari gerakan sosial baru seperti: gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan damai, gerakan perlucutan senjata, dan gerakan kebebasan lokal.

Dibandingkan dengan teori Mobilisasi Sumberdaya yang memfokuskan dan terikat secara signifikan dengan rasionalisme dan materialisme, maka teori Identitas secara umum mempunyai sifat-sifat non-materialistik dan ekspresif (*nonmaterialistic and expressive in nature*). Teori Identitas

membahas pertanyaan-pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif. Para partisipan gerakan sosial baru menegaskan bahwa tindakan diri mereka tidak dalam rangka mengusung nilai-nilai tenaga kerja (*labour values*) akan tetapi lebih mengusung nilai-nilai kemanusiaan secara luas (*whole human*). (dalam Snow dkk, 2004).

Hunt dan Benford (2004) menyatakan bahwa dalam literatur ilmu sosial tentang gerakan, konsep identitas kolektif (*collective identity*) digunakan secara luas. Identitas kolektif dipandang baik sebagai pendahulu (prasyarat) yang diperlukan bagi munculnya tindakan kolektif maupun sebagai hasil dari gerakan tindakan kolektif. Para peneliti telah menggunakan identitas kolektif dalam berbagai teori dan pada semua level analisis. Identitas kolektif telah menjadi pusat kajian analisis tentang kemunculan (*emergence*) gerakan, lintasan (*trajectories*) gerakan, dan dampak (*impacts*) gerakan (dalam Snow, dkk, 2004). Data hasil studi kasus secara jelas menyatakan bahwa terdapat asosiasi antara gerakan aksi kolektif (*movement collective action*) dan identitas kolektif.

Secara umum, identitas kolektif menjelaskan bahwa kelompok individu memiliki kepentingan (*interest*), nilai (*values*), perasaan (*feelings*) dan tujuan (*goals*) bersama. Identitas kolektif di dalamnya meliputi menekankan pada komitmen dari individu, dan menekankan pada solidaritas dari kolektivitas. Komitmen (*commitment*) membantu menjelaskan hubungan individu dan kolektivitas melalui perhatian yang utama kepada aktivitas individu. Sedangkan, solidaritas (*solidarity*) memberikan perhatian kepada tingkat dari kohesivitas sosial yang eksis dalam dan bersama kelompok (dalam Snow, dkk, 2004). Dari uraian penjelasan perspektif teori berorientasi-identitas, maka dapat dirumuskan tentang faktor-faktor determinan terjadinya gerakan sosial, yaitu: (1) Identitas kolektif; (2) Solidaritas; dan (3) Komitmen.

## KESIMPULAN

Internet dan media baru berbasis digital hari ini telah mampu ditransformasikan menjadi perangkat atau alat warga negara dan alat mobilisasi massa. Perangkat media

daring berupa filantropi digital dan voluntarisme digital telah menjadi alat penyeimbang, pengingat, dan suplemen gerakan sosial baru dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Filantropi dan voluntarisme digital disebabkan oleh adanya aktivisme daring yang mengarah pada peningkatan partisipasi sosial warga negara. Ketersediaan program dan komunitas digital memiliki pengaruh besar pada budaya partisipatif warga Negara hari ini di bidang sosial. Internet dan media baru telah menghasilkan paradigma baru bagi kewarganegaraan partisipatif yaitu sebagai alat pemberdayaan. Infrastruktur ini juga telah memfasilitasi meningkatnya partisipasi sosial pada level lokal hingga global. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan lokal dan global secara unik terkait dengan partisipasi warga negara dalam gerakan dan bahwa in internet dan media memainkan peran penting dalam proses ini dengan menumbuhkan rasa kewarganegaraan dalam konteks lokal dan global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akuba, M., & Uno, W. A. (2023). Pengaruh Media Pembelajaran LCD Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS Di SDN 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 945–951. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.24917>
- Baek, K. (2018). The Geographic Dimension of Citizenship in Digital Activism: Analysis of the Relationships Among Local and Global Citizenship, the Use of Social Networking Sites, and Participation in the Occupy Movement. *American Behavioral Scientist*. 62 (8). 1138–1156.
- Batson. C.D. (1991) Why Act For the Public Good? For Answers. Personality, and Interpersonal Correlas of Non Spontaneous Helping Behavior. *Journal For The Theory of Social Behaviour*. 39 (3). 34-50.
- Bettany-Saltikov, J. (2012) *How to Do a Systematic Literature Review in Nursing: A Step-by-Step Guide*. Open University Press, Maidenhead, Berkshire.
- Brock, K, dkk. (2009) Digital activism survey report 2009. Available at: [http://www.digiactive.org/wpcontent/uploads/Research4\\_SurveyReport2009.pdf](http://www.digiactive.org/wpcontent/uploads/Research4_SurveyReport2009.pdf)
- Cox, J., Oh, E.Y., Simmons, B. (2018). Doing Good Online: The Changing Relationships Between Motivations, Activity, and Retention Among Online Volunteers. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. 21 (3). 270-282.
- Dewantara, Ramma Wisnu dan Derajad S Widhyarto. (2015). Aktivisme dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM*. 19 (1). 40-52. ISSN 1410-4946.
- Gabriel, S., & Goetschel, L. (2016). Motivation of Philanthropists In Peacebuilding: Promoting Peace as Personal Satisfaction?. *Journal of Peacebuilding & Development*. 11 (2). 51–65.
- Gray, F. Elizabeth & Kane Hopkins. (2018). Transported: New Zealand Non-Profit Organizations, Digital Platforms and The Limitations Of Metaphor. *New Media & Society*. 21 (3). 750 –769.
- Harlow, Summer. (2011). Social Media and Social Movements: Facebook and an Online Guatemalan Justice Movement that Moved Offline. *New Media & Society*. 14 (2). 225 –243.
- Hughes, C & Southern, A. (2019). The World of Work and The Crisis of Capitalism: Marx and The Fourth Industrial Revolution. *Journal of Classical Sociology*. 19 (1). 59-71.
- Hussin, Zaiha J dan Mohd Ramlan Mohd Arshad. (2012). Altruism as Motivational Factors toward Volunteers among Youth in Petaling Jaya Selangor. *Journal Administrative Science and Policy Studies*. 54 (46). 225-243.
- Indiana University. (2018). Global Philanthropy Environment Index. [online]. Diakses dari <https://globalindices.iuui.edu/environment/index.html> (in Indonesian). (Diakses pada Desember 2018)
- Ismail, I., Putri, R. S., Zulfadhli, Z., Mustofa, A., Musfiana, M., & Hadiyani, R. (2022). Student Motivation to Follow the Student Creativity Program. *Riwayat:*



- Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 351-360. <https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27641>
- Jakimow, Tanya. (2018). Volunteers' Practices of Care In Community Development as A Model For Citizenship In Medan, Indonesia. *Journal Citizenship Studies*. 22 (2). 34-47.
- Kalidjernih, Freddy. K. (2013). *Puspa Ragam Konsep Dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2018). Survey APJII tentang Infografis Profil Perilaku Pengguna Internet di Indonesia. [online]. Diakses dari <http://www.kominfo.go.id>. (Diakses pada December 2018)
- Kemp, S. (2002). The Hidden Workforce: Volunteering Learning in The Olympics. *Journal of European Industrial Training*. 26 (1). 109-116.
- Klandermans, Bert, dkk. (2002). Identity Processes in Collective Action Participation: Farmers` Identity and Farmers` Protest in the Netherlands and Spain. *Political Psychology*. 23 (2). 39-54
- Kou, X., dkk. (2013). The Global Dynamics of Gender and Philanthropy in Membership Associations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. 43 (2).18-38.
- Laclau, Ernest & Chantal Mouffe. (2001). *Hegemony and Socialist Strategy: Toward a Radical Democratic Politics..* London: Verso (New Left).
- Lin, Wan-Ying, dkk. (2010). Becoming Citizens: Youths' Civic Uses of New Media in Five Digital Cities in East Asia. *Journal of Adolescent Research*. 25 (6). 839 -857.
- Locher, David A. (2002). *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Marlow, Jay M, dkk. (2016). Digital Belongings: The Intersections of Social Cohesion, Connectivity and Digital Media. *Ethnicities*. 00 (0). 1-18.
- Matitaputty, J. K., & Sopacua, J. (2023). The Effectiveness of the Learning Cycle 5E Learning Model in an Effort to Improve Learning Outcomes of History. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 740-747. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24816>
- Menon, J.& Fink, A. (2019). The Fourth Industrial Revolution and Its Implications for Regional Economic Integration in ASEAN. *Journal of Asian Economic Integration*. 1 (1). 32-47.
- Moore, N G. (2002). Ethics: The Way To Do Business. *Business and Society Review*. 104 (3).305-309.
- Munir, Misnal. (1997). *Filsafat Voluntarisme. Jurnal Filsafat Ilmu UGM*.
- Nurasiah, N., Amalina, S. N., & Azis, A. (2021). Pengaruh pembelajaran outdoor learning dengan strategi daring terhadap prestasi belajar Mahasiswa Pendidikan Sejarah USK Aceh. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(3), 659-667. <https://doi.org/10.28926/briliant.v6i3.669>
- Nurdiyanti, A. & Suryadi, K. (2019). Digital Philanthropy in Indonesia: Strengthening Civic Virtue for Digital Citizens. *Proceedings of the First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. ISSN : 2352-5398
- Pancer, S. M. (2015). *The Psychology of Citizenship and Civic Engagement*. New York: Oxford University Press.
- Pawluczuk, Alicja, dkk. (2018). Youth Digital Participation: Measuring Social Impact. *Journal of Librarianship and Information Science*. 00 (0). 1-13.
- Permana, A & Prawira, R. M. (2016). Kontribusi Aktivitas Voluntaristik Kaum Muda Terhadap Sosialisasi dan Institusionalisasi Identitas Regional Asia Tenggara Melalui ASEAN Youth Voluntary Program (SYTP) 3013-2016. *Jurnal Studi Pemuda*. (5 (2). 467-486.
- Pichardo, Nelson A. (1988). Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations. *The Sociological Quarterly*. 29 (1). 97-110.
- Pratiwi, W. N. G., & Wahyono, W. (2023). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*

- Sejarah*, 8(3), 1423-1437.  
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25195>
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know, 3rd ed.* Oregon: International Society for Technology in Education.
- Ribble, M., & Miller, T. N. (2013). Educational Leadership in an Online World: Connecting Students To Technology Responsibly, Safely, and Ethically. *Journal of Asynchronous Learning Networks*. 17 (1). 137-145.
- Schäfer, M. (2018). The Fourth Industrial Revolution: How The EU Can Lead It. *European Review*. 17 (1). 5-12.
- Snow, David A, Soule, Sarah A.; & Kriesi, Hauspeter. (2004). *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Van Sylke, David M. dkk. (2007). Nonprofit Performance, Fund Raising Effectiveness, and Strategies for Engaging African Americans in Philanthropy. *The American Review of Public Administration*. 37 (3). 278-305.
- Wilson, J. (2000) . Volunteering. *Annual Review Sociology*. 27 (1). 215-240.
- Yang, H. H., et al. (2018). Social Media Competence and Digital Citizenship Among College Students. *The International Journal of Research into New Media Technologies*. X (XX). 1-18.
- Young, Donna. (2014). A 21st-Century Model for Teaching Digital Citizenship. *Educational Horizons*. 92 (3). 9-12.
- Zuckerman E (2014) New Media, New Civics?. *Policy and Internet*. 6(2). 151-168.